

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dan pendekatan teori film dokumenter, ditemukan bahwa representasi penegakan hukum dalam film ini dibangun melalui pertarungan makna antara dua kutub wacana: legalitas prosedural negara dan narasi tandingan dari pihak oposisi. Wacana penegakan hukum tidak ditampilkan sebagai praktik yang netral dan objektif, melainkan sebagai ruang diskursif yang sarat dengan ideologi, strategi retorik, serta dominasi aktor negara.

Aktor institusi seperti polisi, jaksa, dan hakim dikonstruksi sebagai pilar negara yang bekerja dalam koridor hukum formal, tetapi mereka juga tampil sebagai produsen narasi dominan yang mengarahkan konstruksi makna kasus sejak awal. Polisi membangun kredibilitas melalui bahasa teknis dan logis, jaksa memainkan peran persuasif dan performatif, sementara hakim menjadi penutup naratif dengan legitimasi institusional. Sebaliknya, pengacara dan pakar hukum tampil sebagai representasi perlawanan diskursif yang mengkritisi ketimpangan kuasa, bias prosedural, serta potensi manipulasi dalam proses hukum.

Pada level kognisi sosial, setiap aktor menunjukkan bagaimana skema mental dan persepsi mereka terhadap hukum dibentuk oleh fungsi, posisi, dan kepentingan institusional yang mereka wakili. Sedangkan pada level konteks sosial, penegakan hukum dipengaruhi oleh relasi kuasa, tekanan institusi,

serta narasi media dan opini publik. Sistem hukum digambarkan tidak semata sebagai mekanisme pencari keadilan, tetapi juga sebagai arena produksi legitimasi negara.

Secara visual dan naratif, film dokumenter ini tidak netral. Ia mengonstruksi tokoh hukum sebagai karakter dramatis yang tampil dalam struktur naratif yang kompleks, melalui perangkat sinematik seperti pengambilan gambar, pilihan wawancara, dan alur penyampaian informasi. Representasi ini memperkuat posisi ideologis tertentu dan membentuk persepsi publik terhadap siapa yang dipercaya dan siapa yang diragukan dalam proses hukum.

Selain itu, aktor penegak hukum yang paling dominan adalah jaksa. Dominasi ini terlihat melalui porsi kemunculan yang paling banyak, narasi yang mendalam, serta visualisasi yang paling kompleks dan variatif dibandingkan dengan aktor penegak hukum lainnya seperti polisi, hakim, maupun pengacara. Jaksa ditampilkan dalam beragam situasi baik dalam konteks formal ruang sidang, wawancara personal, maupun kilas balik investigative yang seluruhnya menempatkan mereka sebagai pusat dari konstruksi naratif hukum dalam dokumenter ini.

Secara visual, jaksa diframing dalam komposisi yang menekankan kredibilitas, tekanan profesional, dan kesungguhan dalam menjalankan fungsi negara. Secara naratif, mereka menjadi tokoh yang membawa beban pembuktian, menjembatani logika hukum dengan emosi publik, serta menjadi representasi konkret dari negara dalam menghadirkan keadilan. Dengan

demikian, dominasi jaksa dalam dokumenter ini bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, karena merekalah yang mengarahkan arah narasi hukum dan membentuk persepsi publik mengenai validitas dakwaan dan legitimasi proses peradilan secara keseluruhan. Pilihan tone visual, framing kamera, pencahayaan, dan teknik penyuntingan menjadi instrumen pembentuk persepsi kredibilitas aktor hukum, sehingga penonton diarahkan untuk menerima atau meragukan narasi tertentu.

Penegakan hukum dalam dokumenter ini bukan hanya praktik legal, tetapi juga medan pertarungan simbolik yang sarat retorika, kuasa, dan legitimasi. Film dokumenter menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran publik tentang keadilan, namun pada saat yang sama juga mencerminkan kompleksitas dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya netral dan adil.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Dari sisi teoritis, penelitian ini membuktikan relevansi Analisis Wacana Kritis model Van Dijk dalam mengurai konstruksi wacana penegakan hukum pada film dokumenter, terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengintegrasikan pendekatan analisis yang memadukan dimensi visual, audio, dan teks, serta

membandingkan representasi aktor hukum di berbagai film dokumenter atau media lain untuk melihat konsistensi pola dominasi dan resistensi wacana.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi narasi institusi negara cenderung memarginalisasi wacana tandingan, sehingga diperlukan pelatihan komunikasi publik bagi aparat penegak hukum untuk mendorong keterbukaan informasi dan keberagaman perspektif, serta dorongan bagi pembuat film dokumenter agar menjaga keberimbangan representasi semua aktor hukum. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menyadari bahwa citra dan legitimasi mereka tidak hanya dibentuk oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh cara mereka direpresentasikan di media, sehingga keterlibatan dalam media harus dilakukan secara strategis dan etis.

Dari sisi metodologis, penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses terhadap data produksi film, sehingga studi berikutnya dapat mengombinasikan analisis wacana kritis dengan wawancara mendalam terhadap pembuat film atau aktor hukum, serta analisis resepsi penonton untuk mengukur pengaruh konstruksi wacana terhadap persepsi publik. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu pada berbagai kasus hukum di media visual untuk memetakan perubahan pola wacana dan representasi aktor hukum dari waktu ke waktu.